

**PERAN KORWIL DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN**
(Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal)

TESIS

OLEH

ABDUL RAHIM
NPM. 181801080



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERAN KORWIL DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN**
(Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

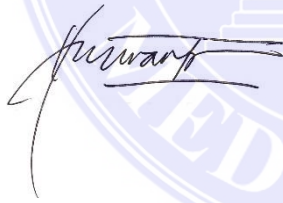
Judul : Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Abdul Rahim

NPM : 181801080

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Adam., M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 30 Juni 2021

Nama : Abdul Rahim

NPM : 181801080



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Penguji Tamu : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 30 Juni 2021

Yang menyatakan,



Abdul Rahim

ABSTRAK

PERAN KORWIL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal)

Nama : Abdul Rahim
NPM 181801080
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat menunjukkan kinerja yang baik, hal ini terlihat dari rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan kesalahan manajemen yang mendasar saat ini dari kalangan para pendidik, di mana mereka disibukkan urusan administrasi yang membuat tidak fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa koordinator wilayah bidang pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal sudah melaksanakan peran sebagai . Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan pelaksana sendiri, tetapi belum memberikan hasil secara optimal. Hal ini karena Korwil III masih menghadapi beberapa faktor kendala. Direkomendasikan agar koordinator wilayah sebaiknya secara periodik memperbaharui data inventaris yang dimiliki masing-masing sekolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melengkapi fasilitas yang masih kurangtersedia, melakukan analisis terhadap berbagai kebutuhan pendidikan, dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru.

Kata Kunci: *Koordinator Wilayah, Kualitas Pendidikan*

ABSTRACT

HE ROLE OF THE KORWIL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

(Study at the Korwil III Office Education Mandailing Natal District)

Name : *Abdul Rahim*
NPM : *181801080*
Study Program : *Master of Science Public Administration*
Supervisor I : *Dr. Heri Kusmanto, MA*
Supervisor II : *Dr. Adam, M.AP*

The Mandailing Natal District Education Office is still unable to show good performance, this can be seen from the low quality of education in the area. This is due to the current basic management error among educators, where they are busy with administrative matters which make them not focus on their main duties as educators. This study aims to determine the role of Korwil in improving the quality of education in Mandailing Natal Regency and to find out the obstacles faced by Korwil in improving the quality of education in Mandailing Natal Regency. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The result of the research is that theregional coordinator for education in Mandiling Natal Regency has carried out the role of . Stabilizers, Innovators, Modernizers, Pioneers and implementers themselves, but have not given optimal results. This is because the RegionalCoordinator III is still facing several obstacles. It is recommended that the regional coordinator should periodically update the inventory data held by each school so that it can be used as a basis for completing the facilities that are still lacking, analyzing various educational needs, and conducting socialization of new regulations.

Keywords: *Regional Coordinator, Education Quality*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan** (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Februari 2021

Penulis

Abdul Rahim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori	8
2.1.1. Teori Peran	8
2.1.2. Organisasi Publik	12
2.1.3. Pendidikan.....	15
2.1.4. Kualitas Pendidikan	23
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.2. Bentuk Penelitian	37
3.3. Informan Penelitian.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Teknik Analisis Data.....	39
3.6. Definisi Operasional	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1. Deskripsi Kabupaten Mandailing Natal	45

v

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal	49
4.1.3. Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal	50
4.2. Pembahasan.....	81
4.2.1. Peran Korwil Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal	81
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Korwil Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal	116
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan manusia karena dengan pendidikan maka akan dapat diwujudkan individu yang cerdas dan terampil untuk mengembangkan diri menjadi individu yang unggul dan memperoleh kesejahteraan hidup. Disamping itu, pembangunan nasional juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber-sumber ekonomi secara efisien dan efektif tanpa terlalu banyak melibatkan tenaga ahli dari negara asing. Terdapat paradigma bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang (sektor) pembangunan nasional, sehingga negara terpaksa harus menggunakan tenaga ahli dari negara asing dengan gaji yang relatif tinggi dan menyebabkan peningkatan pengeluaran devisa nasional. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan anak bangsa menjadi sumber daya manusia yang berkeahlian untuk menggantikan tenaga kerja asing.

Secara definisi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spritual, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mempunyai akal dan budi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara harus mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik sehingga dapat

berkontribusi secara maksimum dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Mujamil (2012:3), mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dengan demikian mutu pendidikan mengacu pada kemampuan pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang agar menjadi lebih mampu memenuhi berbagai keahlian yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Lembaga pendidikan yang bermutu dapat dibuktikan dari lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar dan semua pihak mengakui kehebatan lulusannya. Secara nasional, standar mutu pendidikan dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indicator, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaam, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Kedelapan standar mutu pendidikan tersebut membentuk rangkaian yang terpadu dalam menentukan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Dengan memperhatikan berbagai standar mutu pendidikan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan sangat tergantung pada dinas pendidikan dalam mengelola berbagai faktor dalam pendidikan, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan bertugas dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah. Dinas Pendidikan berperan membantu sekolah menyusun rencana dan program peningkatan kualitas (mutu) pendidikan, sehingga rencana yang

terprogram pada setiap lembaga pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien mencapai tujuan yang ditetapkan. Disamping itu, dinas pendidikan juga berperan penting melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring atau pengawasan tentu menjadi hal yang sangat penting mengingat setiap program pendidikan hanya dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan pengawasan yang baik pula. Pengawasan akan lebih menjamin bahwa setiap kegiatan tetap terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil kegiatan juga penting dilaksanakan agar dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan telah berhasil dilaksanakan, serta mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, yang kemudian disertai dengan upaya untuk mengatasi kendala. Dengan demikian jelas bahwa dinas pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan mutu pendidikan di suatu daerah.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan pendidikan di Kabupaten ini dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk melaksanakan fungsinya, dinas pendidikan mempunyai unit kerja yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang kemudian dirubah menjadi Koordinator Wilayah (Korwil). Dalam hal ini, UPTD telah dihapus dan diganti menjadi Korwil. Perubahan tersebut didasarkan Permendagri No 12/2017 tentang Pembentukan dan Pengklasifikasian Cabang Dinas dan UPTD, dimana khusus untuk UPTD dibawah Dinas Pendidikan akan digantikan menjadi Koordinator Wilayah yang statusnya bukan lagi struktural melainkan menjadi fungsional

sehingga kewenangannya juga berbeda. UPTD boleh mengambil kebijakan, sedangkan Korwil tidak boleh mengambil kebijakan.

Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan merupakan unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang koordinator, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris Dinas Pendidikan melalui kasubbag umum dan kepegawaian. Koordinator wilayah bidang pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinir, merencanakan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan dengan cara penerimaan dan mencatat, mengelompokkan, menghubungi pihak terkait, dan mengawasi pelayanan pendidikan jenjang TK, SD, SMP dan PNF (Pendidikan Non Formal) di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, optimal dan tepat sasaran. Korwil berfungsi memfasilitasi kebutuhan kepala sekolah dan guru, serta berperandalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan di kecamatan. Dinas pendidikan di Kabuapten Mandailing Natal membagi area kerja menjadi 5 Korwil, yang salah satu di antaranya adalah Korwil III yang mencakup dua wilayahkecamatan, yaitu Kecamatan Panyabungan Baru dan Kecamatan Hutabargot.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat menunjukkan kinerja yang baik, menurut Dodi Martua sebagai anggota DPRD Mandailing Natal bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019 menunjukkan Mandailing Natal masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah di antara daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan kesalahan manajemen yang mendasar saat ini dari kalangan para pendidik, di mana mereka disibukkan

urusan administrasi yang membuat tidak fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik. Berbagai anggapan muncul ketika para pendidik dan kepala sekolah tidak lagi fokus pada menggali potensi minat dan bakat serta kreatifitas siswanya. Justru mereka lebih banyak membahas sertifikasi guru, pembagian jam mengajar serta target menyelesaikan bab demi bab materi ajar tanpa evaluasi.

Disamping Itu Korwil tidak memiliki data yang lengkap mengenai inventaris atau fasilitas yang terdapat pada masing-masing sekolah. Inventarisasi fasilitas sekolah yang lengkap hanya terdapat pada pada masing-masing sekolah, sedangkan pada kantor korwil tidak lengkap. Korwil tidak berperanmengkoordinir pelaksanaan lomba antar sekolah sehingga kurang mendukung terhadap peran korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di KabupatenMandailing Natal. Korwil tidak berupaya membantu satuan pendidikan memahami setiap kebijakan baru sehingga kurang mendukung terhadap peran korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Apa faktor kendala yang dihadapi Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun menganalisis secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya peran Korwil Bidang Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Peran

Peran menurut Soekanto (2014:212) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepatutnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku

yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu :

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut Siagian (2012:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Davey (2011:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi

pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidakberubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur

dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai,

karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

2.1.2. Organisasi Publik

2.1.2.1. Pengertian Organisasi Publik

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167), pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik.

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

2.1.2.2. Tujuan Organisasi Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.

Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan:

- a. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- b. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya.
- c. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

2.1.3. Pendidikan

2.1.3.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui

pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan orang bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga

pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera

didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara (Haryanto, 2012).

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan

akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Menurut Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya (<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 November 2019).

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut (<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 November 2019).

Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja dalam Syah (2012:11), pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan

mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negeranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Haryanto, 2012).

Menurut Heidjrachman dan Husnah (2013:77) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Notoadmodjo (2013:77), kalau pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang di lakukan disekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi

disekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya.

Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik. Apalagi kita hidup di jaman sekarang ini pendidikan sangatlah diperlukan karena pendidikan itu akan membawa kita tidak ketinggalan jaman tetapi kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita.

Pangertian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun titik sudut pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun. Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah pada satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses dalam membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah-langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan yang serba dilandasi pegetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovatif yang hanya bisa didapat dengan proses mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh

banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

2.1.3.2. Tujuan dan Proses Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan ada dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenapkomponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga harus dicegah terjadi.

Disini terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik (Tirtarahardja et al., 2015:33).

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Tujuan pendidikan

bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan yang ingin dicapai itu dibuat jelas (eksplisit), konkret, dan lingkup kandungannya terbatas. Dengan kata lain tujuan umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan di dalam praktek.

Secara keseluruhan macam-macam tujuan tersebut merupakan suatu kebulatan. Tujuan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci dan yang jenjangnya lebih rendah. Sebaliknya tujuan yang lebih khusus menunjang pencapaian tujuan yang lebih luas dan yang jenjangnya lebih tinggi untuk sampai kepada tujuan umum.

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan (Tirtarahardja et al., 2015:34).

Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya dituangkan dalam bentuk UU Pendidikan, Peraturan Pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen-dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lain. Pengelolaan dalam ruang lingkup meso

merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional ke dalam kebijakanoperasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah tanggungjawab Kakanwil Depdikbud. Pengelolaan dalam ruang lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas.

Yang menjadi tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar. Sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal itu. Kegiatan mendidik diri setiap saat sepanjang hidup itu selalu merupakan kebutuhan terlepas dari hasilnya. Juga bukan semata-mata sebagai bekal untuk kehidupan di masa mendatang. Dengan kata lain, pendidikan itu merupakan bagian integral dari hidup itu sendiri. Prinsip pendidikan seperti itu mengandung makna bahwa pendidikan itu lekat dengan diri manusia, karena dengan itu manusia dapat terus menerus meningkatkan kemandiriannya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat, meningkatkan *self fulfillment* (rasa kepenuhmaknaan) dan terarah kepada aktualisasi diri. Dalam hubungan dengan lingkungan mereka dapat menyesuaikan diri secara adaptif dan kreatif terhadap tantangan zaman (Tirtarahardja et al., 2015:37).

2.1.3.3. Pendidikan Sebagai Sistem

Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen, yaitu:

- 1) Sistem baru merupakan masukan mentah (*raw input*) yang akan diproses menjadi tamatan (*output*).

- 2) Guru dan tenaga nonguru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana merupakan masukan instrumental (*instrumental input*) yang memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah menjadi tamatan.
- 3) Corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan negara merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan (*enviromental input*) yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap berperannya masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah.

Sistem pendidikan terdiri dari 3 subsistem, yaitu:

- 1) Pendidikan Nonformal,
- 2) Pendidikan Formal,
- 3) Pendidikan Informal. Pendidikan Formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi. Sementara itu pendidikan Taman kanak-kanak masih dipandang sebagai pengelompokan belajar yang menjambatani anak dalam suasana hidup dalam keluarga dan di sekolah dasar.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, dinyatakan setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal (putus sekolah)

disediakan pendidikan non-formal, untuk memperoleh bekal guna terjun ke masyarakat. Pendidikan non-formal (PNF) sebagai mitra pendidikan formal (PF) semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan. Pendidikan informal sebagai suatu fase pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan nonformal sangat menunjang keduanya.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat tergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan.

2.1.4. Kualitas Pendidikan

2.1.4.1. Pengertian Kualitas Pendidikan

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Gasprez (2011:4), definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan (*easy of use*), estetika (*esthetic*) dan sebagainya. Definisi strategi dari mutu adalah suatu yang

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Dalam ISO 8402 (*Quality Vocabulary*) dalam Gasperz (2011:5) bahwa kualitas di definisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*conformance to the requirement*). Disini produk dapat berbentuk (*tangible*), tak berbentuk (*intangibile*) atau kombinasi keduanya.

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang sedang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dewasa ini. Menurut Sallis (1993) dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2017:295) bahwa: Mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi yang ditentukan secara sepihak, yakni oleh produsen (jasa atau barang). Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mutu adalah ukuran untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal berupa standar ideal yang ingin dicapai oleh suatu proses.

Sedangkan definisi pendidikan dalam Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Supriadi (2018:10) pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan itu terjadi melalui pengaruh dari seseorang yang telah dewasa kepada orang yang belum dewasa. Dalam hal ini pendidikan ialah semua usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan yang diberikan harus tertuju kepada anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Sebelum penulis menarik kesimpulan tentang kualitas (mutu) pendidikan. Ada yang perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu bahwa pengertian kualitas pendidikan, merupakan suatu konsep yang bisa berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan, yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Dalam konteks menurut Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip Mulyasa (2010:206) bahwa pengertian mutu mencakup input, proses, dan

output. Konsepsi input dan output pendidikan sejauh ini merupakan gambaran mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Mutu pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksana pendidikan, karena perangkat pelaksana pendidikan memiliki lingkup kegiatan langsung berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Suryadi (2011:299), mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam dua dimensi yaitu kemampuan teknis dan pengelolaan. Menurut Umiarso dan Gojali (2010:124), mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.

Menurut Sallis dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2017:299) bahwa mutu pendidikan merupakan fungsi dari proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan, peran serta guru, peran serta siswa, manajemen, organisasi, lingkungan fisik dan sumberdaya, kepuasan pelanggan sekolah, dukungan input dan fasilitas, dan budaya sekolah. Optimalisasi dari masing-masing komponen ini menentukan mutu sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan.

Menurut Danim (2012:53) bahwa mutu pendidikan mengacu padamasukan, proses, iuran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya

manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketentuan, dan cita-cita. Mutu pendidikan difokuskan kepada mutu proses pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini mencakup sejumlah unsur utama yang mendasar yang membentuk mutu kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dana, manajemen dan evaluasi.

Dengan demikian, pengertian tentang mutu pendidikan adalah tingkat atau taraf atau derajat kemampuan dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

2.1.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas (Mutu) Pendidikan

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sedangkan sekolah terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen persekolahan, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki jaringan langsung atau tidak terhadap dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat, sekolah, orangtua dan siswa itu sendiri. Menurut Maslikhah (2012:889), ada empat faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu: Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif tidak dijadikan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Ketiga, masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan sekolahnya. Keempat, evaluasi pendidikan seringkali dibelokkan dengan kepentingan tertentu.

Menurut Isjoni (2013:22), pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa sektor yang merupakan kebutuhan mendasar karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan diantaranya yaitu: Pertama, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, WC guru dan murid. Kedua, sarana dan prasarana pembelajaran, berkaitan dengan pengadaan alat dan mediapembelajaran, untuk bidang IPA, IPS, Bahasa, dan bidang lainnya,

seperangkat alat praktek laboratorium, pengadaan buku-buku perpustakaan, dan sebagainya. Ketiga, pembangunan SDM, kualifikasi pendidikan guru. Keempat, Pembangunan sektor pendidikan luar sekolah. Kelima, pembangunan life skill.

Menurut Sidi (2011:74), ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan:

- a. membenah kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal.
- b. peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- c. penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- d. pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah.
- e. penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif antar sekolah.

Dari semua pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan kualitas atau mutu pendidikan menitikberatkan kepada pengembangan komponen-komponen yang ada dalam satuan pendidikan dan pembangunan mutu secara keseluruhan mulai dari pemerintah, sekolah dan masyarakat atau stakeholder pendidikan, agar dalam proses peningkatan mutu pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan baik dari aparatur pemerintah maupun satuan pendidikan itu sendiri. Faktor penentu atas keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan juga ditentukan atas kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana guru akan mengajar lebih efektif, dan hasil belajar anak didiknya baik, kalau sarana pembelajaran dalam kelas tidak tersedia. Ini jelas akan menjadi kebijakan

pemerintah karena itu tugas pemerintahlah untuk menyediakan sarana pembelajaran di kelas yang diperlukan guru. Seperangkat pembelajaran tersebut sangat menentukan dalam mewujudkan mutu pendidikan.

2.1.4.3. Dimensi Kualitas Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017:3) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output.

Masing-masing penjelasan indikator mutu pendidikan tersebut sebagaiberikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

2. Standar Isi

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

3. Standar Proses

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk

mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Artinya, pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di mana pun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini.

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

7. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

8. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Penelitian Irwan Efendi (2013) dengan judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pendidikan Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Plus Nidhomiyah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tahun pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah bukan saja berperan dalam administrasi saja, tapi lebih dari itu kepala Sekolah harus mampu menjalankan peran sebagai supervisor di lembaganya.

Hasil penelitian Rosyadi (2014) dengan judul Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP 1 Cilawu, Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai seorang manajer berperan: (1) Merencanakan program dengan merinci kebutuhan pendidik dan

tenaga kependidikan yang akan menjalankan tugas, merencanakan program berupa kebijakan kepala sekolah dan kurikulum yang akan dijalankan, merencanakan kebijakan penambahan mata pelajaran bimbingan konseling dengan waktu dua jam per minggu; (2) Membuat struktur organisasi yang melibatkan orang tua murid melalui komite sekolah dan melengkapi sarpras yang dibutuhkan oleh sekolah; (3) Memberi contoh yang baik dan tenang dalam bekerja, memberi motivasi, memberi penghargaan terhadap personilnya baik moril maupun materil, meningkatkan kesejahteraan, mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam diklat-diklat dan memotivasi guru senior agar memiliki semangat life long education; (4) Mengawasi output, PBM, dan peserta didik mulai dari proses penerimaan sampai selesai sekolah. (5) Adapun hambatan yang dialami adalah adanya personil yang masih tidak disiplin, kurangnya komunikasi antara kepala sekolah dengan sebagian personil, Dana BOS yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Temuan tambahan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah menjadi konservator budaya dengan melaksanakan budaya keagamaan, disiplin, berprestasi, dan kebersihan.

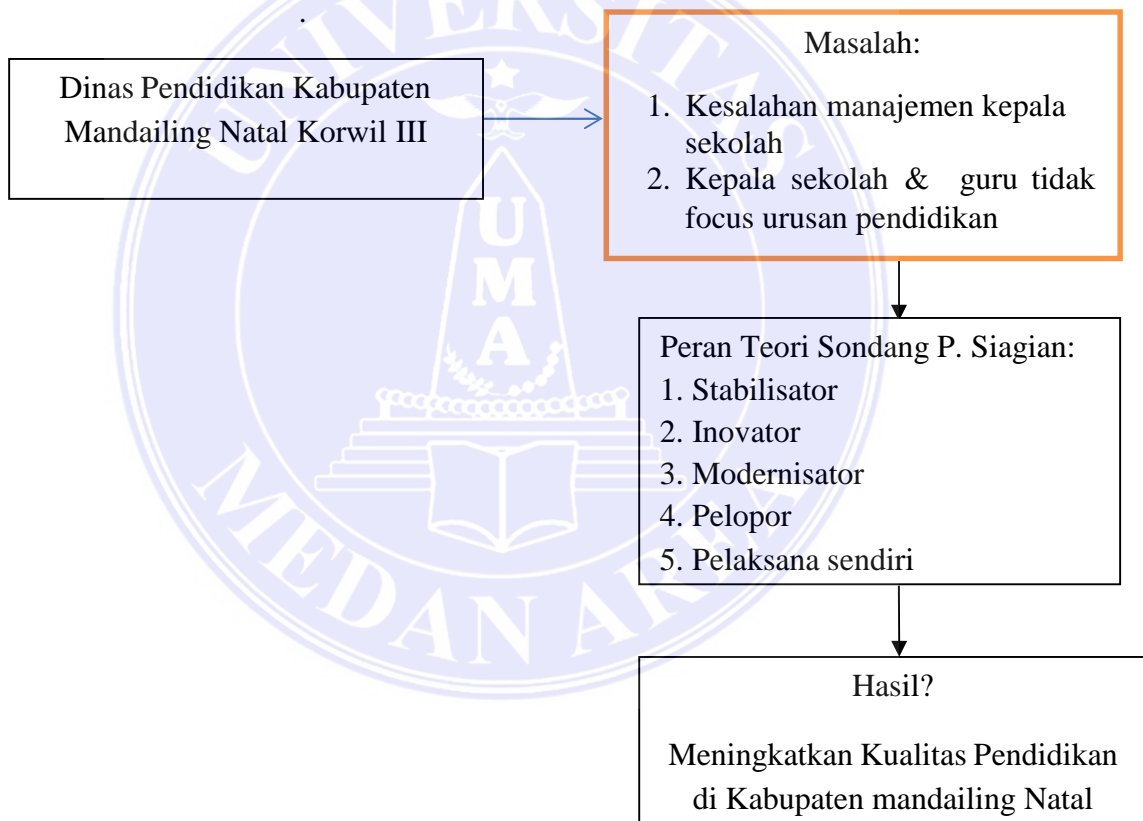
2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam pengelolaan pendidikan di kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan dalam menjalankan fungsinya dinas ini membagi 5 korwil yang salah satunya adalah korwil III dengan membawahi dua kecamatan. Dalam pelaksanaan fungsinya ternyata dinas pendidikan belum mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini karena dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai permasalahan. Untuk mengetahui lebih

dalam tentang permasalahan ini maka dilakukan penelitian dan teori yang pakai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori Peran dari Sondang P Siagian. Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Korwil III.

3.2. Bentuk Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yakni memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti (Sugiyono, 2012:39).

3.3. Informan Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisilatar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2010:132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan Prastowo (2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi

sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010:172) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
2. Bendahara Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
3. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
4. Kepala SMP Negeri 1 Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal
5. Kepala SD 135 Barabaran Kabupaten Mandailing Natal.
6. Kepala SD 137 Longkat Kabupaten Mandailing Natal.
7. Komite Sekolah SD 144 Longat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances*

yang telah disusun sebelumnya.. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal).

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber dataterkait dengan peran Korwil dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Muslich (2009:41) yang dimaksud dengan analisis data adalah pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

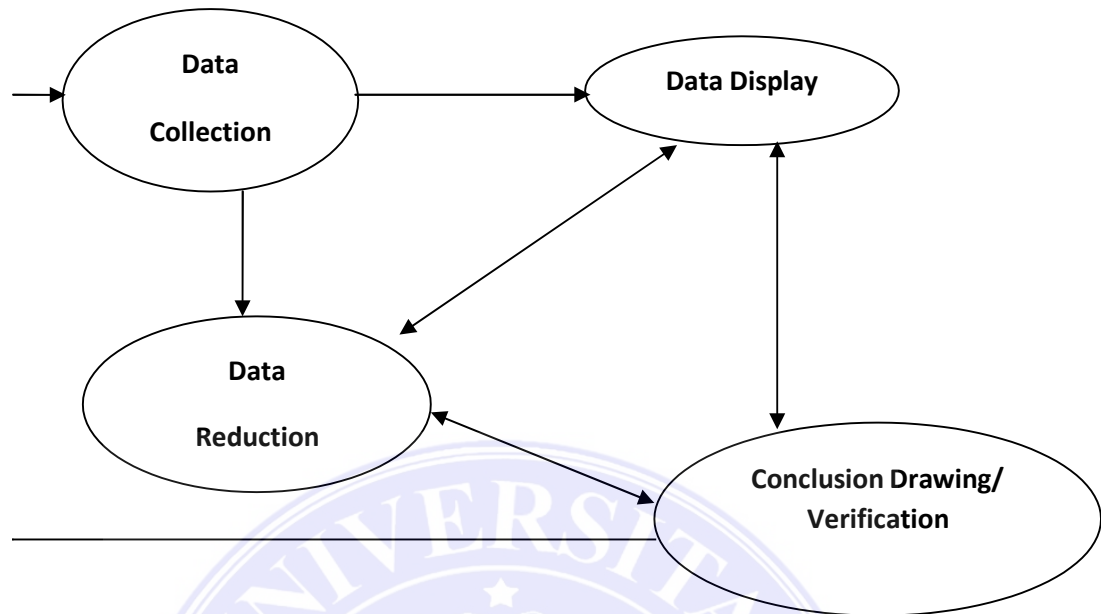
Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2012:431)

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan mempunyai unit kerja yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang kemudian dirubah menjadi Koordinator Wilayah (Korwil)
2. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan merupakan unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang koordinator, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada sekretaris melalui kasubbag umum dan kepegawaian.

3. Kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.
4. Dalam Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki

tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban

pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Korwil diharapkan berperan dengan melaksanakan tupoksinya sebagaimana di atur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2018, dengan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya
2. Pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya
4. Pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kabupaten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinator wilayah III bidang pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan analisis teori Saondang P Siagian sudah melaksanakan perannya sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana sendiri namun belum memberikan hasil secara optimal. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan perannya, koordinator wilayah masih menghadapi berbagai faktor kendala.
2. Adapun faktor kendala yang dihadapi koordinator wilayah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah: Koordinator wilayah tidak memiliki data yang lengkap mengenai inventaris atau fasilitas yang terdapat pada masing-masing sekolah, koordinator wilayah tidak dapat melaksanakan perannya dalam mengkoordinir perlombaan antar sekolah yang berhubungan dengan pengembangan bakat dan minat siswa, koordinator wilayah tidak mampu memberikan pengarahan mengenai peraturan yang baru terbit karena kurangnya pemahaman, serta saran yang disampaikan koordinator wilayah kepada dinas pendidikan sering tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada analisis yang mendalam.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Koordinator wilayah sebaiknya secara periodik memperbaharui data inventaris yang dimiliki masing-masing sekolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang tersedia.
2. Koordinator wilayah sebaiknya berusaha memahami setiap peraturan baru agar dapat memberi penjelasan yang lengkap kepada setiap satuan pendidikan.
3. Koordinator wilayah sebaiknya melakukan analisis yang mendalam mengenai fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk disarankan kepada dinas pendidikan sehingga nantinya fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Davey, K.J. 2011. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek. Internasional dan Relevansinya dengan Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press
- Efendi, Irwan. 2013. *Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pendidikan Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Plus Nidhomiyah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tahun pelajaran 2012/2013*. Jember: Jurusan Tarbiyah Program Pendidikan Agama Islam STAIN Jember, 2012/2013.
- Gasprez, Vincent. 2011. *Total Quality Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto. 2012. *Macam-macam Metode Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heidjrachman dan Husnah. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Isjoni. 2013. *Pembelajaran Kooperatif, Meningkatkan Kecerdasan Antar Peserta Didik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Indikator Mutu Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Maslikhah. 2012. *Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Mulyasa. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2013. *Manajemen Personalialia, Cetakan Keenam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyadi. 2014. *Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP 1 Cilawu, Kabupaten Garut*. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarwono, Sarlito. 2016. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.

- Sidi. 2011. *Pemimpin dan Kepimimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh, Alfabeta, Bandung.
- Supriadi. 2018. *Kapabilitas Pemimpin Demokratis Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Suryadi. 2011. *Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suyatno, Bagong. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syah, Muhibbin. 2012. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Adminisrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tirtarahardja, Umar. 2015. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (<http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi-tujuan-pendidikan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 1 November 2019)
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Stabilisator Melalui Pengumpulan Data Peserta Didik, Sarana, Prasarana, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kerja

1. Apakah korwil aktif mengumpulkan data mengenai peserta didik pada setiap satuan pendidikan ?
2. Apakah korwil memiliki data yang lengkap tentang sarana dan prasarana pada setiap satuan pendidikan ?
3. Apakah korwil memiliki data tentang identitas guru dan staf pada setiap satuan pendidikan ?

B. Inovator Melalui Pengadministrasian Usul Kenaikan Pangkat dan Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Apakah korwil menampung semua usulan kenaikan pangkat dan angka kredit serta meneliti kelengkapan administrasinya ?

C. Modernisator Melalui Pelaksanaan Koordinasi Lomba-lomba di Wilayah Kerja

1. Apakah korwil aktif mengkoordinasikan pelaksanaan lomba yang diselenggarakan antar sekolah ?
2. Apakah korwil aktif mendorong setiap satuan pendidikan untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan antar satuan pendidikan ?

D. Pelopor Melalui Pelaksanaan Tugas Administrasi di Lingkungan Koordinator Wilayah

a. Merencanakan

1. Apakah korwil membuat rencana kerja ?
2. Apakah rencana kerja korwil disesuaikan dengan kebutuhan sekolah ?
3. Apakah rencana kerja dibuat secara terperinci ?
4. Apakah rencana kerja yang ditetapkan cukup realistis untuk dilaksanakan ?.

b. Mengarahkan

1. Apakah korwil melakukan pengarahan atas setiap peraturan yang baru ditetapkan ?
2. Apakah korwil melakukan pengarahan mengenai pencapaian standar mutu pendidikan nasional ?
3. Apakah korwil melakukan pengarahan mengenai pentingnya standar kompetensi guru ?.

c. Mengawasi

1. Apakah korwil aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional sekolah ?
2. Apakah pengawasan dikoordinasikan dengan organisasi profesi pengawas ?
3. Apakah hasil-hasil pengawasan dikoordinasikan dengan kepala sekolah ?.

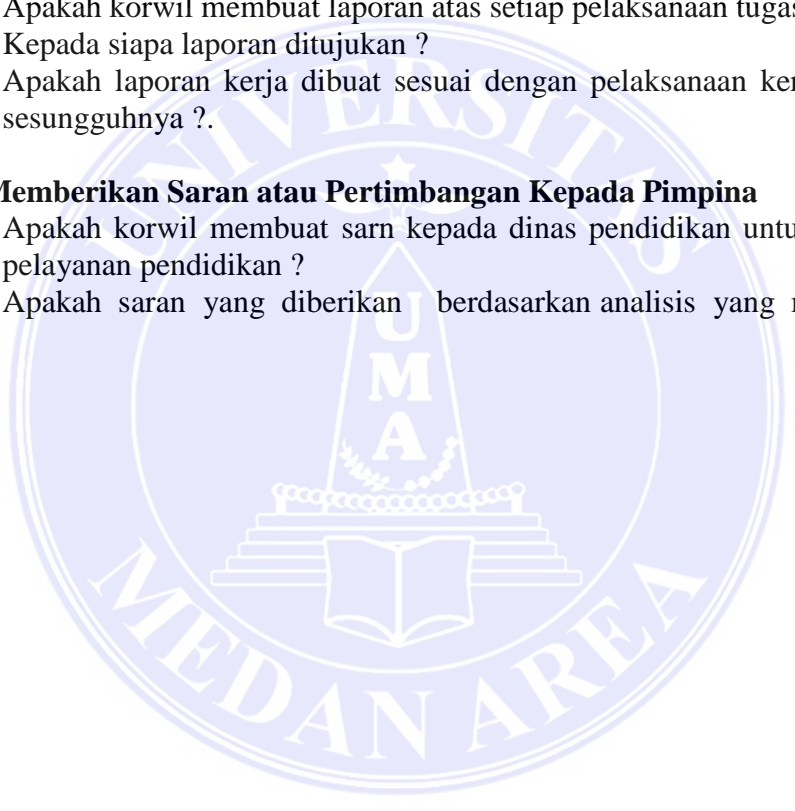
E. Pelaksana Sendiri Melalui Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

a. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

1. Apakah korwil membuat laporan atas setiap pelaksanaan tugas ?
2. Kepada siapa laporan ditujukan ?
3. Apakah laporan kerja dibuat sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya ?.

b. Memberikan Saran atau Pertimbangan Kepada Pimpinan

1. Apakah korwil membuat saran kepada dinas pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan ?
2. Apakah saran yang diberikan berdasarkan analisis yang mendalam ?



5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahim
NPM : 181801080
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Korwil dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi pada Korwil III Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 11 November 2021

Yang menyatakan



(Abdul Rahim)